

2022

LAPORAN MONEV CAPAIAN KINERJA TW IV
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN BULELENG



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN BULELENG**

Jalan Ngurah Rai Nomor 72 Singaraja
Telp/Fax: (0362) 22063 Website : dpmptsp.bulelengkab.go.id
Email : domotso@bulelengkab.go.id

LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI PENCAPAIAN RENCANA AKSI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2022 TRIWULAN IV

Laporan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Rencana Aksi Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng Tahun 2022 merupakan review kinerja pencapaian kinerja DPMPTSP Tahun 2022. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Rencana Aksi Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng Tahun 2022 mempunyai beberapa fungsi, antara lain merupakan alat penilaian ketepatan target atau rencana aksi kinerja tahunan terhadap pencapaian yang dipantau secara berkala atau triwulan dan sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTS Kabupaten Buleleng menuju terwujudnya *good governance* dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat secara umum, selain itu juga merupakan alat kendali, pemacu, dan umpan balik peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Buleleng melalui review atas target pada kinerja berikutnya.

Dengan mengucapkan terima kasih, disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun. Semoga laporan monitoring dan evaluasi pencapaian rencana aksi ini dapat bermanfaat untuk perbaikan pencapaian kinerja pada tahun berjalan sehingga dapat segera memberikan rekomendasi atas target yang di capai pada tahun berikutnya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah bahwa tugas pokok DPMPTSP adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Administrasi Perizinan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Administrasi Perijinan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Administrasi Perijinan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Administrasi Perijinan;
4. pelaksanaan administrasi dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Jumlah izin yang ditangani DPMPTSP Kabupaten Buleleng sesuai Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Berusaha di Daerah dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah 2022 Nomor 21) adalah 113 (seratus tiga belas) jenis perizinan dan sejumlah 52 (lima puluh dua) non perizinan yang dikelola

1.2. Rencana Strategis

Berdasarkan kondisi umum daerah Kabupaten Buleleng saat ini, permasalahan, tantangan dan isu-isu strategis yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis, potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2017-2022 dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Buleleng yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana”**.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Adapun misi pembangunan Kabupaten Buleleng untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif;
2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas;
4. Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan;
5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik;
6. Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng mendukung terwujudnya visi maka melaksanakan misi yang ke-1 yaitu “*Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif*” dan tujuan “*Pembangunan Ekonomi yang Inklusif*” dan sasaran “*Meningkatnya pertumbuhan ekonomi didorong oleh munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan*”.

Tujuan penyelenggaraan pembangunan bidang Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng dalam rangka pencapaian tujuan RPJMD yaitu: “*pertumbuhan ekonomi yang inklusif*” melalui tujuan yaitu “*Meningkatnya nilai investasi*”.

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng adalah “*meningkatnya pertumbuhan ekonomi didorong oleh munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan*” melalui:

- a. Meningkatnya kerjasama di bidang investasi
- b. Meningkatnya nilai investasi dan realisasi investasi
- c. Meningkatnya kualitas pengelolaan pengaduan
- d. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan A
- e. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan B
- f. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
- g. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD

Untuk dapat melihat keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran serta rumusan strategi dan kebijakan yang diselaraskan dengan Program yang menjadi Urusan Penanaman Modal pada RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana		
MISI I	Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya Nilai Investasi	1.1 Meningkatnya kerjasama di bidang investasi	1.1 Memberikan pedoman dan gambaran kepada investor untuk memilih jenis dan program investasi yang sesuai dengan keinginannya;	1. Menginventaris dan menyusun <i>feasibility study</i> terhadap potensi-potensi investasi; 2. Merumuskan sistem promosi investasi dan sistem kerjasama investasi baik dalam skala Nasional, Regional maupun Internasional;
	1.2 Meningkatnya nilai investasi dan realisasi investasi	1.2 Memberikan kemudahan kepada investor dalam mendapatkan berbagai informasi di bidang Penanaman Modal dan Perijinan;	1. Merumuskan dan meningkatkan sistem koordinasi dengan dinas/badan/kantor/bagian dan kelembagaan lainnya;
			2. Merumuskan pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perijinan
			3. Merumuskan sistem pembinaan dan pengendalian bidang penanaman modal dan perijinan
	1.3 Meningkatnya kualitas pengelolaan pengaduan	Mengoptimalkan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).	1. Merumuskan mekanisme pelaksanaan sistem pelayanan perijinan dan non perizinan bagi investor;
	1.4 Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan A		
	1.5 Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan B		
	1.6 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	1.6 Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan bidang penanaman modal dan perizinan dan non perizinan;	1. Menyediakan sarana prasarana aparatur yang layak fungsi
1.7 Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	1.7 Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya aparatur	1. Merumuskan sistem peningkatan profesionalisme Sumber Daya Aparatur	

Tabel 2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Nilai Investasi		Persentase Peningkatan Nilai Investasi	1%	1%	1%	1%	1%
		Meningkatnya kerjasama di bidang investasi	Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali
			Jumlah Investor	5 Investor	5 Investor	5 Investor	5 Investor	5 Investor
		Meningkatnya nilai investasi dan realisasi investasi	Nilai Investasi	1.248.778.389.000 Rupiah	1.261.266.173.000 Rupiah	1.273.878.834.000 Rupiah	1.286.617.623.000 Rupiah	1.299.483.799.000 Rupiah
		Meningkatnya kualitas pengelolaan pengaduan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan A	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan A	80,60 Nilai	80,80 Nilai	81,00 Nilai	80,25 Nilai	81,50 Nilai
		Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan B	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan B	80,60 Nilai	80,80 Nilai	81,00 Nilai	80,25 Nilai	81,50 Nilai
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase akuntabilitas kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen		

BAB II
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENCAPAIAN RENCANA AKSI

2.1. Perjanjian Kinerja

Mengacu pada sasaran, program, indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tabel diatas, selanjutnya ditetapkan Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2022 ini merupakan tindak lanjut tekad dan janji tahun 2022 dari para pejabat dan staf di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng yang menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan pada akhir tahun nanti sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian.

Tabel 3.
Perjanjian Kinerja Induk Tahun 2022

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Nilai investasi	Nilai Realisasi Investasi	Rp 1.299.483.799.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat	81,50 Nilai
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Prosentase akuntabilitas kinerja SKPD	100%
		Prosentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	100%

Pada tahun 2022 terdapat 5 program yang dilaksanakan, dan untuk Pagu Perubahan yang ditetapkan bulan Oktober terdapat penambahan pagu sebesar Rp.220.308.750 yang mana dari 5 Program yang ada terjadi pengurangan dan penambahan pagu diantaranya 1. Pada Program Promosi Penanaman Modal terjadi pengurangan Pagu sebesar Rp 25.173.001 dari pagu induk Rp364.716.249 pagu perubahan menjadi Rp 339.543.248 2. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota terdapat penambahan pagu sebesar Rp4.157.363 dari pagu induk Rp. 1.104.970.545 menjadi Rp. 1.109.127.908. 3. Program Pelayanan Penanaman Modal Terdapat pengurangan pagu sebesar Rp16.881.109 dari pagu induk Rp. 1.146.983.955 menjadi Rp. 1.130.102.846,- 4. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal terdapat penambahan pagu sebesar - Rp17.943.916 dari pagu induk sebesar Rp.155.141.037,- menjadi Rp.173.296.576,- dan 5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdapat penambahan pagu untuk Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar RP. 240.261.581 yang semula pada pagu induk sebesar Rp 6.887.783.214 di pagu perubahan menjadi Rp7.128.044.795 Perubahan Pagu Induk ke Pagu Perubahan dapat dilihat pada Tabel 4 sebagai berikut.

Tabel 4.
Pagu Perubahan Tahun 2022

No	Program	Induk	Perubahan	Keterangan
1	Program Promosi Penanaman Modal	Rp.364.716.249	Rp339.543.248	APBD 2022
2	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.1.104.970.545	Rp1.109.127.908	APBD 2022
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp.1.146.983.955	Rp1.130.102.846	APBD 2022
4	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp.155.141.037	Rp173.296.576	APBD 2022
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.6.887.783.214	Rp7.128.044.795	APBD 2022
TOTAL		Rp.9.659.595.000	Rp.9.879.903.750	

2.2. Pencapaian Rencana Aksi

Berdasarkan Renstra dan IKU DPMPTSP terdapat 1 sasaran strategis yaitu “Meningkatnya Nilai Investasi” dan 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Peningkatan Nilai Investasi”. Pada tahun 2022 sesuai dengan hasil asistensi dengan bagian organisasi pada Pohon kinerja, cascading dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 ada perubahan pada indikator kinerja di mana terdapat 2 (dua) indikator yaitu “Nilai Realisasi Investasi” dan “Indeks Kepuasan Masyarakat”.

Tabel 5.
Capaian Rencana Aksi DPMPTSP Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022

Sasaran Strategis Program	Indikator	Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2022 (Triwulan IV)			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2022 terhadap target akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Realisasi Investasi	1.660.856.438.666	1.299.483.799.000	448.674.280.461	34,53 %	1.299.483.799.000	34,53 %
	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,1	81,5	82,41	100,6%	81,50,	101%

Nilai Investasi belum memenuhi target yaitu hanya Rp.448.674.280.461,- atau 34.53 % dari nilai Investasi PMDN sebesar Rp. 322.338.300.000 dan PMA sebesar RP. 126.335.980.461

belum tercapainya Nilai Investasi disebabkan adanya Kesadaran Pelaku Usaha untuk Melaporkan Usahanya melalui LKPM masih terkendala adanya system yang baru sehingga banyak pelaku usaha yang belum mengerti untuk melaporkan ke system LKPM. Pelaksanaan sosialisasi terhadap masyarakat terkait kebijakan dan pentingnya ijin untuk legalitas usaha belum optimal dan akan dilaksanakan pada bulan Juli sampai desember 2022. Pelaksanaan Pendampingan dan pelatihan terhadap masyarakat dalam mengakses OSS sudah dilaksanakan 100%

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Semester II Tahun 2022 adalah 82.06, dan berada pada kategori “BAIK” nilai IKM semester II sudah melebihi dari target yang sudah ditentukan atau sekitar 101%.

2.3. Pencapaian Program Kegiatan

Capaian Kinerja Program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng tahun 2022 Triwulan IV adalah sebagai berikut.

1. Program Promosi Penanaman Modal meliputi 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal dan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota. Pada triwulan IV dari target 5 Investor pada tahun 2022 mampu tercapai 1 Pelaksanaan Promosi dan 2 Investor. Secara fisik sudah tercapai 95,25 % dan realisasi keuangan tercapai 100%.
2. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota meliputi 1 (satu) kegiatan yaitu Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu, Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal. Nilai Realisasi Investasi PMDN sebesar Rp. 322.338.300.000 PMA sebesar Rp. 126.335.980.461 sehingga total nilai realisasi investasi triwulan IV adalah sebesar Rp. 448.674.280.461 atau sekitar 34.53 % dari total target investasi tahun 2022. Pada Triwulan IV tahun 2022 realisasi investasi belum memenuhi target yang ditentukan karena Sesuai Permen Investasi/BKPM No.5 th 2022 pelaporan LKPM bagi Pelaku Usaha dilakukan per triwulan bagi usaha menengah dan besar dan semester untuk usaha kecil sehingga % nilai Investasi belum maksimal, Secara fisik sudah tercapai 95,25% dan realisasi keuangan tercapai 100%.

Sedangkan untuk kegiatan pengawasan Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan tahun 2022 pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal yang merupakan ruang lingkup kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal setelah anggaran perubahan mengalami penurunan anggaran menjadi sebesar Rp. 679.978.743 yang sebelumnya di anggaran induk mendapatkan anggaran sebesar Rp. 713.854.405, bersumber dari dana DAK Non Fisik Fasilitas

Penanaman Modal sebesar Rp. 72.881.100,- dan dari APBD sebesar Rp. 578.963.887,- Untuk pengukuran kinerja kegiatan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6

Pengukuran Kinerja Kegiatan

Triwulan IV Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran	Realisasi s.d TW IV	Persentase (%)
1.	Kegiatan Pengawasan	Rp. 679.978.743,-	Rp. 651.844.987,-	96
2.	Out put	4 dokumen	4 dokumen	100

Berdasarkan tabel 1 untuk realisasi keuangan dari anggaran Kegiatan Pengawasan dengan anggaran sebesar Rp. 679.978.743,- realisasi sebesar Rp. 651.844.987,- atau sebesar 96% untuk kegiatan pengawasan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal realisasi sebesar Rp. 68.053.950,- atau sebesar 93,38 %.

Kegiatan pengawasan pelaku usaha dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pelaku Usaha Di Kabupaten Buleleng sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 503/225/HK/2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang Tim Pengawasan Pelaku Usaha di Kabupaten Buleleng yang juga melibatkan SKPD terkait. Kegiatan Pengawasan yang dilakukan diawali dengan menyusun rencana pengawasan berupa, :

- a. Analisis Data Pelaku Usaha yang akan dijadikan obyek pengawasan,
- b. Penyusunan Jadwal Pengawasan Pelaku Usaha
- c. Mempersiapkan Dokumen Bahan kelengkapan Pengawasan seperti Surat pemberitahuan, Berita Acara, Surat Tugas dan SPPD).

Adapun Pengawasan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu :

A. Pengawasan Menara Telekomunikasi

Pada Triwulan II tahun 2022 dilaksanakan Kegiatan pengawasan pengendalian menara telekomunikasi seperti dapat dilihat pada tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7.

Data Pengawasan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Tahun 2022

No	Nama Perusahaan	Jumlah pengawasan Th. 2022
1.	PT. Inti Bangun Sejahtera	2
2.	PT. Mitratell	47
3.	PT. Protelindo	82
4.	Tower Bersama Group	55
5.	PT. Bali Towerindo Sentra	14
6.	PT. Performa Telecommunication	8
7.	PT. Epid Menara Assetco	8
8.	PT. Centratama Menara Ind.	21
9.	Smart Telecom	2
10.	Menara Radio	9
	J U M L A H	248

Pada tabel 2 dapat dilihat hasil pengawasan menara telekomunikasi pada tahun 2022 sebanyak 248 menara dari 9 perusahaan menara telekomunikasi dan 8 perusahaan radio, jadi total menara telekomunikasi yang sudah diawasi sebanyak 248 Menara telekomunikasi. Kegiatan ini didasari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 yang sudah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor tahun 2022 tanggal 25 Januari 2022 Tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pelaku Usaha Di Kabupaten Buleleng sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 503/225/HK/2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang Tim Pengawasan Pelaku Usaha di Kabupaten Buleleng yang juga melibatkan SKPD terkait.

Tindak lanjut dari kegiatan Pengawasan Menara Telekomunikasi berupa Rekapitulasi Penetapan Surat Ketetapan Retribusi sebagai dasar untuk pembayaran retribusi pemanfaatan ruang menara telekomunikasi pada tahun 2022. Rekapitulasi Surat ketetapan retribusi dapat dilihat pada tabel 8 sebagai berikut :

Tabel 8.

Data Rekapitulasi Surat Ketetapan Retribusi

Menara Telekomunikasi Tahun 2022

	NAMA PERUSAHAAN	JUMLAH	JUMLAH
--	-----------------	--------	--------

NO		MENARA	RETRIBUSI
1	INTI BANGUN SEJAHTERA	2	4.800.000
2	PROTELINDO	82	196.800.000
3	MITRATEL	47	112.800.000
4	TOWER BERSAMA GRUP	55	132.000.000
5	BALI TOWERINDO	14	33.600.000
6	PERFORMA TEL.	8	19.200.000
7	PT. CENTRATAMA MENARA IND	21	50.400.000
8	PT.EPID MENARA ASSETCO	8	19.200.000
9	SMART TELECOM	2	4.800.000
10	PT. RADIO GUNTUR BANYUNING	1	2.400.000
11	PT. RADIO SINGARAJA FM TUKADMUNGGGA	1	2.400.000
12	PT. RADIO CITRA BALI PANJI	1	2.400.000
13	PT. RADIO HEXON	2	4.800.000
14	PT. RADIO NUANSA GIRI WANAGIRI	1	2.400.000
15	PT. RADIO SEMETON TAKDIR LOKAPAKSA	1	2.400.000
16	PT. RADIO PESONA BALI BANYUNING	1	2.400.000
17	PT. RADIO MAHADEWI PENGULON	1	2.400.000
	J U M L A H	248	595.200.000

Dari 248 menara telekomunikasi yang diawasi ditetapkan jumlah retribusi yang harus dibayarkan oleh perusahaan menara telekomunikasi sebesar RP. 595.200.000 (lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya oleh Substansi Pelayanan A dibuatkan Surat Ketetapan Retribusi sebagai dasar penagihan Retribusi menara Telekomunikasi tahun 2022.

B. Pengawasan Air Bawah Tanah

Adapun Pengawasan yang kami lakukan pada tahun 2022 dilaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan Air Bawah Tanah oleh para pelaku usaha dan sekaligus pengawasan akomodasi pariwisata yang memiliki Bar yang melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang Kabupaten Buleleng serta Satuan Polisi Pamong Praja, Rekapitulasi Kegiatan pengawasan pemanfaatan Air Bawah Tanah per Kecamatan dapat dilihat seperti pada tabel 9 sebagai berikut :

Tabel 9.

Data Pengawasan Pemanfaatan Air bawah Tanah

Tri Wulan IV Tahun 2022

No	Kecamatan	Bulan Oktober	Bulan Nopember	Bulan Desember	Total tahun 2022
1.	Gerokgak	-	-	-	75
2.	Seririt	-	-	-	51
3.	Busungbiu	-	-	-	-
4.	Banjar	-	-	-	48
5.	Buleleng	-	25	16	91
6.	Sukasada	-	-	-	-
7.	Sawan	-	-	-	4
8.	Kubutambahan	-	-	-	9
9.	Tejakula	-	-	-	33
	J U M L A H	-	25	16	311

Pada tabel dapat dilihat hasil pengawasan Pemanfaatan Air Bawah Tanah pada tahun 2022 dari Triwulan I sampai dengan triwulan IV di Kecamatan Gerokgak sebanyak 75 pelaku usaha, di di Kecamatan Seririt sebanyak 51 pelaku usaha. di Kecamatan Banjar sebanyak 48 pelaku usaha, Kecamatan Buleleng 91 Pelaku usaha, Kecamatan Sawan 4

pelaku usaha Kecamatan Kubutambahan 9 pelaku usaha dan Kecamatan Tejakula sebanyak 33 pelaku usaha jadi total pelaku usaha yang yang memanfaatkan Air Bawah tanah yang diawasi sebanyak 311 pelaku usaha. Untuk di Kecamatan Busungbiu dan Sukasada nihil karena pelaku usaha yang memanfaatkan air bawah tanah sangat sedikit, sehingga kegiatan pengawasan kurang efektif, untuk hal ini kami akan awasi pada saat kegiatan pengawasan rutin.

C. Pengawasan Insidentil

Berdasarkan surat dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Singaraja nomor : 973/XI-09/0822, tanggal 4 Agustus 2022, Hal Permohonan Pemeriksaan Insidentil terkait adanya tunggakan iuran BPJS Kesehatan dari beberapa pelaku usaha, bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Kantor cabang Singaraja dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng, pada tanggal 23 sampai dengan 25 Agustus 2022 melaksanakan pengawasan insidentil terhadap pelaku usaha yang masih memiliki tunggakan iuran BPJS Kesehatan, data pengawasan insidentil dimaksud dapat dilihat seperti pada tabel 10 sebagai berikut :

Tabel 10.

Data Pelaku Usaha yang Diawasi secara Insidentil

NO	PELAKU USAHA	ALAMAT
1	CV. MEGA ART DECORINDO	Jl. Serma Karma No 20 X, Kec. Buleleng
2	PT. BHUANA MURTI PERSADA	Jl. Laksamana Barat No.126 C, Kec. Buleleng
3	DJEMARI REFLEXOLOGI & SPA	Jl. Serma karma No.10 baktoseraga, Kec. Buleleng
4	CV. MAJA KARYA GUNA	Jl. Tasbih No.11 Singaraja, Kec. Buleleng
5	PT. PORANG BALI DEWATA	Jl. Pratu Subrata Lingk. Sangket, Kec. Sukasada
6	BLOOM VILLA	BD. Bululada Desa Selat, Kec. Sukasada
7	PT. REMACO BALI TRANSPORT	BD. Kelodan desa Ringdikit, Kec. Seririt
8	PT. GERBANG RAHAJENG INDAH	Desa Umejero Kec.

	ALAMI	Busungbiu
9	VILLA BATU BATU	Jl. Lotus KM.7 Dsn. Corot Dencarik, Kec. Banjar
10	CV. MUSI JAYA	Jl. Seririt Goilimanuk, Kec. Gerokgak
11	GLOBAL RESOURCESTRADER CORPORATION	Desa Gerokgak, Kec. Gerokgak
12	PT. WILWATIKA GRAHA NUSANTARA	Jl. Pandu No. 11 Desa Sangsit, Kec. Sawan
13	PT. HARTA AJEG LESTARI	Jl. Pulau Obi, Kec. Buleleng
14	CV. TARU PERMANA	Jl. Singaraja Kintamni Desa Bila, Kec. Kubutambahan
15	BENGKEL LAS PRIMA	Jl. Sangsit- Jagaraga No.999 Kec. Sawan

Berdasarkan data yang diberikan oleh BPJS Kesehatan Kantor Cabang Singaraja, ada sebanyak 19 pelaku usaha yang masih menunggak iuran BPJS Kesehatan, tetapi hanya 15 pelaku usaha yang bisa kita awasi, 4 pelaku usaha lainnya tidak ada ditempat pada saat pengawasan, pelaku usaha tersebut dapat dilihat pada tabel 11 sebagai berikut :

Tabel 11.

Data Pengawasan pelaku usaha yang tidak bertemu pemiliknya

NO	PELAKU USAHA	ALAMAT
1	PT. SILI GITHA	Jl. Samudra Loka 98 Banjarasem , Kec. Seririt
2	PRO MOTOR	Jl. Raya Kerobokan Singaraja, Ds, Kerobokan Kec. Sawan
3	CV. TIRTA MULYA	Jl. Pulau Batam GG. Murai No.26 Singaraja, Kec. Buleleng
4	CV. ADI TUNGGAL	BD. Dangin Yeh, desa Giri Mas, Kec. Sawan

Keempat pelaku usaha tersebut sudah dihubungi sebelumnya melalui telepon, tetapi pada saat pengawasan sedang tidak berada ditempat dan tidak diwakilkan kepada siapapun. Sehingga tim tidak mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk dibuatkan berita acara selanjutnya akan dijadwalkan kembali oleh BPJS.

D. Pengawasan Rutin Pelaku Usaha Yang memanfaatkan dana DAK

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 juga dilaksanakan pengawasan rutin terhadap Pelaku Usaha yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik tahun 2022, data pengawasan per bidang usaha dapat dilihat pada tabel 12 sebagai berikut :

Tabel 12.

Data Pengawasan Pelaku Usaha per Bidang Usaha

Yang bersumber dari DAK NF Tahun 2022

No	Kecamatan	Bulan Oktober	Bulan Nopember	Bulan Desember	Total Tahun 2022
1.	Industri	4	-	-	20
2.	Konstruksi	8	12	-	39
3.	Pariwisata	21	1	-	41
4.	Perdagangan	20	1	3	36
5.	Perikanan	-	-	-	23
6.	Perumahan	-	4	-	4
	J U M L A H	53	18	3	169

Pengawasan pelaku usaha yang memanfaatkan Dana Alokasi Khusus Non Fisik sampai dengan bulan Desember tahun 2022 sudah kami lakukan dengan mengawasi sebanyak 169 pelaku usaha dengan berbagai bidang usaha antara lain : bidang usaha industri sebanyak 20 pelaku usaha, bidang usaha konstruksi sebanyak 39 pelaku usaha, bidang usaha akomodasi pariwisata sebanyak 41 pelaku usaha, bidang usaha perdagangan sebanyak 36 pelaku usaha, bidang usaha perikanan sebanyak 23 pelaku usaha dan bidang usaha perumahan sebanyak 4 pelaku usaha. Total Pelaku usaha yang kami awasi menggunakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal pada tahun 2022 sebanyak 169 pelaku usaha.

3. Program Pelayanan Penanaman Modal meliputi 1 (satu) kegiatan yaitu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan. Substansi Bagian A.I/II, total izin terbit sebanyak 2351 atau 94,04 % dari target izin sebanyak 2.250 ijin. Sedangkan A.III, realisasi ijin terbit Triwulan IV = 1437 atau 287.4% dari target sebanyak 250 ijin. Jadi dari target tahunan 3000 ijin untuk triwulan IV mampu tercapai sebesar 3788 ijin atau sekitar 126,27 %.

Pada bidang B Ijin Terbit tahunan 3000 ijin untuk triwulan IV mampu tercapai sebesar 3.880 ijin atau sekitar 129,33 %.

Untuk pelaksanaan Program Kegiatan Secara fisik sudah tercapai 100% dan realisasi keuangan tercapai 97.09%.

Jumlah Ijin Terbit Semester IV dapat Dilihat Pada Tabel 13

Tabel 13.
Rekap Jumlah Izin Terbit Triwulan IV Tahun 2022

Bidang/ Seksi	Ijin Terbit Tahun 2022												TOTAL		
	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			Target	Realisasi	%
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
Bidang A															
A/I.II	625	9	1,44	1250	465	37,20	1875	1183	63,09	2500	2351	94,04	2500	2351	94,04
A/III	125	226	180,8	250	408	163,20	375	679	181,07	500	1437	287,40	500	1437	287,40
Jumlah	750	235	31,33	1500	873	58,20	2250	1862	82,76	3000	3788	126,27	3000	3788	126,27
Bidang B															
B/I.II	375	120	32,00	750	425	56,67	1125	904	80,36	1500	1552	103,47	1500	1552	80,36
B/III	375	412	109,87	750	1272	169,60	1125	1774	157,69	1500	2328	155,20	1500	2328	157,69
Jumlah	750	532	70,93	1500	1697	113,13	2250	2678	119,02	3000	3.880	129,33	3000	3.880	129,33
Total	1500	767	51,13	3000	2570	85,67	4500	4540	100,89	6000	7.668,00	127,80	6000	7.668	127,80

4. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan 1 (satu) kegiatan yaitu Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Semester II Tahun 2022 adalah 82.06, dan berada pada kategori “BAIK” nilai IKM semester II sudah melebihi dari target yang sudah ditentukan atau sekitar 101%.

Sedangkan untuk capaian Program Kegiatan untuk fisik sudah mencapai 100% dan Capaian Keuangan mencapai 99.54%

5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan 5 (lima) kegiatan yaitu Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang realisasi fisiknya sudah mencapai 100% dan realisasi keuangan mencapai 98.10%. Terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di mana untuk dokumen perencanaan dari target 5 dokumen sudah terealisasi 100% yaitu RKA, RKT, Renja, Renstra dan IKU, untuk dokumen anggaran berupa DPA Induk dan DPA Perubahan, untuk laporan kinerja dan laporan pertanggungjawaban dari 4 dokumen sudah terealisasi 4 dokumen yaitu LKPI, LKjIP dan LPPD dan SAKIP dari target 10 dokumen terealisasi 10 dokumen yaitu RAPK Induk, PK Induk, PK Perubahan RAPK Perubahan dan CRAPK Tw I, II, I dan IV SOP, SP masih. Kegiatan kedua adalah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang realisasi fisiknya sudah mencapai 100% dan realisasi keuangan mencapai 92.74% yang terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD di mana sudah tersusun laporan keuangan triwulan, anjab dan ABK, dokumen gaji dan tunjangan ASN untuk triwulan IV. Kegiatan ketiga adalah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang realisasi fisiknya sudah mencapai 100% dan realisasi keuangan mencapai 91.47% terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan yaitu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Bahan logistik kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Fasilitasi Kunjungan Tamu dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Kegiatan keempat yaitu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang realisasi fisiknya sudah mencapai 100% dan realisasi keuangan mencapai 89.92% terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Surat Menyurat dari target 1.500 surat pada triwulan IV tercapai 1.500 surat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Kegiatan Kelima adalah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang realisasi fisiknya sudah

mencapai 100% dan realisasi keuangan mencapai 96.48% terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lain.

BAB III EVALUASI CAPAIAN RENCANA AKSI

Untuk dapat melihat ketercapaian indikator pada rencana aksi DPMPTSP Tahun 2022, berikut disajikan data pencapaian rencana aksi tiap Triwulan selama Tahun 2022

TABEL 14
CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)								
				Target Kinerja Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program	Target Anggaran Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Ke t		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Realisasi Investasi	Rupiah	1.299.483.799.000	Triwulan I	324.870.000.000	179.674.951.672	55,31	Investasi PMDN sebesar Rp.322.338.300.000 PMA sebesar Rp.126.335.980.461 Pada Triwulan IV tahun 2022 realisasi investasi belum memenuhi target yang ditentukan karena secara periodik dilakukan pembinaan, pengawasan dan pemantauan kepada pelaku usaha PMDN namun pelaku usaha masih bingung untuk mendaftarkan usahanya pada system LKPM yg baru	Program Promosi Penanaman Modal	339.543.248	Triwulan I	91.179.063	33.395.422	36,63			
					Triwulan II	649.740.000.000	222.219.328.449	34,2				Triwulan II	182.358.126	86.947.720	47,68			
					Triwulan III	974.610.000.000	285.694.185.003	21,99				Triwulan III	273.537.189	225.528.298,00	82,45			
					Triwulan IV	1.299.483.799.000	448.674.280.461	34,53				Triwulan IV	339.543.248	323407210	95,25			
					Triwulan I	-	-	0		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.109.127.908	Triwulan I	277.000.000	43.919.328	15,86			
					Triwulan II	81,5	82,02	100,6				Triwulan II	552.485.273	286530320	51,86			
					Triwulan III	81,5	82,02	100,6				Triwulan III	831.000.000	508.353.598	61,17			
					Triwulan IV	81,50	82,06	100,6				Triwulan IV	1.109.127.908	1.027.293.314	92,62			
					Triwulan I	-	-	0				Program Pelayanan Penanaman Modal	1.130.102.846	Triwulan I	286.700.000		145.393.352	50,71
					Triwulan II	81,5	82,02	100,6						Triwulan II	573.500.000		470959571	82,12
	Triwulan III	81,5	82,02	100,6	Triwulan III	860.000.000	784.836.477	91,26										
	Triwulan IV	81,50	82,06	100,6	Triwulan IV	1.130.102.846	1097194813	97,09										
	Triwulan I	-	-	0	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	173.084.953	Triwulan I	39.000.000	19.810.204	50,80								
	Triwulan II	81,5	82,02	100,6			Triwulan II	78.000.000	59.430.612	76,19								
Triwulan III	81,50	82,06	100,6	Triwulan III			116.500.000	83.104.116	71,33									
Triwulan IV	81,50	82,06	100,6	Triwulan IV			173.084.953	172296576	99,54									
TOTAL											2.751.858.955		2.751.858.955	2.620.191.913	95,22			

TABEL 15

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG

KONDISI SAMPAI DENGAN BULAN : DESEMBER

RKA/DPA TAHUN ANGGARAN 2022

JUMLAH PROGRAM	5
JUMLAH KEGIATAN	8
JUMLAH SUB KEGIATAN	28

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUBKEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME		ANGGARAN	OUTPUT	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5)/(4)*100		(8)
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	7.128.044.795,00	100,00	6.557.087.050,00	100,00	%	91,99	100,00	
2.18.01.2.01	1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD	154.201.051,00	100,00	151.268.744,00	100,00	%	98,10	100,00	
2.18.01.2.01.01	1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen anggaran - Jumlah dokumen perencanaan	85.119.142,00	2,00 5,00	85.098.348,00	2,00 5,00	Dokumen	99,98	100,00	
2.18.01.2.01.06	1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	30.505.909,00	3,00	30.396.396,00	3,00	Laporan	99,64	100,00	
2.18.01.2.01.07	1.1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SAKIP	38.576.000,00	10,00	35.774.000,00	10,00	Laporan	92,74	100,00	
2.18.01.2.02	1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	5.173.659.639,00	100,00	4.732.356.095,00	100,00	%	91,47	100,00	
2.18.01.2.02.01	1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan	4.989.738.090,00	2,00	4.548.905.673,00	2,00	Dokumen	91,17	100,00	
2.18.01.2.02.02	1.1.2 Penyediaan Admimistrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen kepegawaian	31.413.330,00	2,00	31.289.586,00	2,00	Dokumen	99,61	100,00	
2.18.01.2.02.03	1.2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah administrasi keuangan	151.431.741,00	3,00	151.431.566,00	3,00	Dokumen	100,00	100,00	
2.18.01.2.02.05	1.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1.076.478,00	1,00	729.270,00	1,00	Laporan	67,75	100,00	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

|

2.18.01.2.06	1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	682.115.753,00	100,00	613.388.229,00	100,00	%	89,92	100,00	
2.1.18.01.2.06.0	1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	19.503.477,00	8,00	17.555.538,00	8,00	Jenis	90,01	100,00	
2.1.18.01.2.06.0	1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	375.222.599,00	30,00	343.941.499,00	30,00	Unit	91,66	100,00	
2.18.01.2.06.04	1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah sarana/prasarana upacara	91.588.589,00	8,00	77.299.400,00	8,00	Jenis	84,40	100,00	
2.18.01.2.06.05	1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan	29.279.913,00	12,00	25.864.617,00	12,00	Jenis	88,34	100,00	
2.18.01.2.06.06	1.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	9.490.000,00	36,00	9.360.000,00	36,00	Rekening	98,63	100,00	
2.18.01.2.06.08	1.3.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis makanan dan minuman	46.199.175,00	8,00	44.889.175,00	8,00	Jenis	97,16	100,00	
2.18.01.2.06.09	1.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah/dalam daerah	110.832.000,00	50,00	94.478.000,00	50,00	OH	85,24	100,00	
2.18.01.2.02	1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Prosentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	747.106.663,00	100,00	702.160.644,00	100,00	%	93,98	100,00	
2.18.01.2.08.01	1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	71.415.410,00	1.500,00	70.797.347,00	1.500,00	Exmplar	99,13	100,00	
2.18.01.2.08.02	1.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, telepon, dan listrik	105.500.000,00	84,00	92.167.495,00	84,00	Rekening	87,36	100,00	
2.18.01.2.08.03	1.4.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah unit kendaraan	192.000.000,00	2,00	191.532.000,00	2,00	Unit	99,76	100,00	
2.18.01.2.08.04	1.4.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-Jumlah alat kebersihan	378.191.253,00	31,00	347.663.802,00	31,00	Jenis	91,93	100,00	
			-Jumlah alat tulis kantor		54,00		54,00	Jenis			
2.18.01.2.09	1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	370.961.689,00	100,00	357.913.338,00	100,00	%	96,48	100,00	
2.18.01.2.09.02	1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai	349.902.389,00	21,00	336.961.755,00	21,00	Unit	96,30	100,00	

2.18.05		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya Investasi	1.109.127.908,00	1.169.535.419.100,00 1.299.483.799.000,00	1.027.293.314,00	100,00	Rp	92,62	100,00	
2.18.05.2.01	4.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai investasi dalam negeri yang sesuai ketentuan. Nilai investasi luarnegeri yang sesuai ketentuan	1.109.127.908,00	1.169.535.419.100,00 129.948.379.900,00	1.027.293.314,00	100,00	Rp	92,62	100,00	
2.18.05.2.01.02	4.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah dokumen pembinaan pelaksanaan penanaman modal	429.149.165,00	4,00	375.773.332,00	4,00	Dokumen	87,56	100,00	
2.18.05.2.01.03	4.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah dokumen pengawasan pelaksanaan penanaman modal	679.978.743,00	4,00	651.519.982,00	4,00	Dokumen	95,81	100,00	
2.18.06		Program Pengelolaan data dan	Meningkatkatnya Investasi	173.084.953,00	100,00	172.296.576,00	100,00	%	99,54	100,00	
2.18.06.2.01	5.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	173.084.953,00	100,00	172.296.576,00	100,00	%	99,54	100,00	
2.18.06.2.01.01	5.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah media informasi perizinan dan non perizinan yang berbasis sistem pelayanan secara elektronik	173.084.953,00	1,00	172.296.576,00	1,00	media	99,54	100,00	
JUMLAH TOTAL				9.879.903.750,00	100,00	9.177.278.963,00	100,00		92,89	100,00	96,44

Singaraja, 31 Desember 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kabupaten Buleleng



I Made Kuta, S.Sos

Pembina (IV/a)

NIP. 19700710 199203 1 007

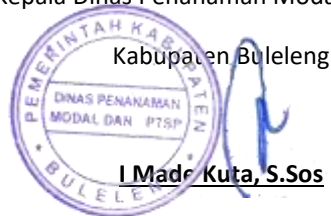
BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Aksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Triwulan II Tahun 2022 ini di susun dengan harapan segala tugas yang telah di laksanakan pada bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini dapat menjadi salah satu bagian penting dalam proses pembangunan Kabupaten Sukabumi yang lebih baik dalam rangka pencapaian visi terwujudnya Kabupaten Buleleng yang religius dan mandiri

Singaraja, 5 Oktober 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kabupaten Buleleng



I Made Kuta, S.Sos

Pembina (IV/a)

NIP. 19700710 199203 1 007

